

## PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019

Muhammad Shabri Sambojo Utomo, Restu Rahmawati, Anwar Ilmar

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[sambojoutomo@gmail.com](mailto:sambojoutomo@gmail.com); [restu.rahmawati@upnvj.ac.id](mailto:restu.rahmawati@upnvj.ac.id); [anwar.ilmar@upnvj.ac.id](mailto:anwar.ilmar@upnvj.ac.id)

### ABSTRACT

*This Journal aims to discuss the role of political parties, namely the NasDem Party in political education in DKI Jakarta after the 2019 simultaneous elections with the formulation of the problem, how is the role of the NasDem Party in providing political education for the public and NasDem party cadres in DKI Jakarta after the 2019 simultaneous elections?. By using the concept of the role of political parties and the concept of political education. The method used is descriptive qualitative using primary data sources and secondary data with data collection techniques in the form of interviews with 5 resource persons and literature study. Researchers used three stages of data analysis according to Miles & Huberman, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The final result of this study shows that the role of the NasDem party in political education in DKI Jakarta after the simultaneous election is the DKI Jakarta NasDem Party. Creating and organizing structured and incidental political education programs, Positioning itself in society to provide transformation to the community and NasDem DKI being a driving force for the community. better political education, and Facilitating necessary political education programs for the community, in this political education NasDem DKI Jakarta also facilitates public complaints. The three roles have a political goal, namely to maintain and expand their constituent base. In conclusion, the DKI Jakarta NasDem Party has carried out a structured or systematic and unique program of political education activities in accordance with the concept of Kartini Kartono. The DKI Jakarta NasDem Party can provide benefits to its cadres from the existing political education program in accordance with the political party concept from Carl J. Friedrich, but the DKI Jakarta NasDem Party has not seen a significant role of political education directly to the community, especially the people of DKI Jakarta.*

**Keywords:** Roles, Political Party, Political Education, NasDem Party, 2019 Simultaneous Elections

### PENDAHULUAN

Fenomena politik seperti politik uang (*money politics*), politik identitas dan hoax politik marak terjadi dan tidak dapat dihindari saat sebelum pemilu dan pasca pemilu. Money politic adalah istilah yang mendeskripsikan pemakaian uang atau imbalan lain

untuk mempengaruhi keputusan politik yang dibuat oleh individu, kelompok, atau lembaga. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan (2010: 19) menyatakan money politic sebagai praktik yang dapat dipengaruhi oleh uang pada setiap tahapan pemilu, yang mengarah pada kepentingan satu parpol atau calon atau merugikan kelompok politik lain. Ada banyak bentuk dan tahapan politik uang dalam pemilu. Contohnya yaitu politik uang pada tahapan pencalonan, transaksi suara pada tahapan pemilu dan perhitungan suara. Termasuk menyuap pelaksana pemilihan umum selama fase penghitungan dan rekapitulasi suara, serta menyuap saat menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Masalah lainnya adalah money politic dapat melahirkan pemilihan umum menjadi kontetasi yang timpang dan kotor. Penerapan suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dilakukan dengan biaya yang besar. Sedangkan tidak semua orang memiliki biaya yang besar (Ghaliya, 2019: 44).

Selain itu, dalam pemilu juga terdapat fenomena permasalahan lainnya yaitu banyak terjadi politik identitas dalam pemilu. Politik identitas adalah perilaku politik yang mempunyai sentimen etnis, ras, dan agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pada hakekatnya identitas adalah sesuatu yang baik karena melekat pada diri kita sendiri, seperti melekat pada kota, desa, atau hal-hal orisinal lainnya yang telah kita ciptakan. Tetapi, ketika identitas menjadi politik atau politisasi identitas dilakukan oleh elit politik, identitas bisa menjadi alat pemecah belah negara. Proses pemilu yang seharusnya menjadi tempat untuk menyampaikan keinginan rakyat, namun justru dipermainkan oleh politik identitas. Identitas politik dianggap sebagai alat untuk memperoleh suara masyarakat dan mempertahankan kekuasaannya, sayangnya pemerintah gagal mengelola pemerintahan yang adil dan bijaksana. Selain itu, opini publik media publik terkadang berbeda dengan kenyataan, memperburuk keadaan. Padahal tidak dapat dipungkiri banyak rakyat di Indonesia juga sudah mengimplementasikan sikap tenggang rasa dalam keberagaman, namun oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan situasi, sehingga masyarakat mudah di adu domba (Qotimah & Barokah, 2020: 101)

Alasan penulis memilih politik uang dan politik identitas sebagai sebuah permasalahan adalah politik uang bisa melatih masyarakat untuk bertindak curang dan untuk para pelaku praktik politik uang yang terpilih bisa menyalahgunakan jabatan, terlibat korupsi dan terciptanya produk perundangan yang tidak tepat sasaran karena mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukanlah ahli dibidangnya dan

akan sangat merugikan Negara, karena Negara menjadi tidak berkembang (Kpu-tanjungpinangkota.com, 2020). Selain itu, politik identitas ini menjadi sebuah permasalahan karena politik identitas bisa mengancam ketentraman bangsa karena hilangnya pluralitas atau sifat toleransi sehingga bisa membuat masyarakat saling berselisih dan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Fenomena politik uang, politik identitas, dan hoax politik tidak hanya terjadi saat menjelang pemilu tetapi pasca pemilu fenomena politik seperti politik uang, politik identitas, dan hoax juga dapat terjadi. Fenomena politik uang, politik identitas dan hoax yang dijelaskan diatas dapat terjadi karena karena masyarakat belum terdidik secara politik dengan optimal maka dari itu pendidikan politik sangat diperlukan. Pendidikan politik memiliki beraneka macam pengertian, bergantung pada sudut pandang dan dimensi yang ingin dibicarakan, tetapi semuanya harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan politik secara umum adalah "Upaya memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, mengembangkan kesadaran setiap warga negara berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan rasa kepekaan dan pemahaman masyarakat mengenai hak- haknya, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara" (Naning, 1982:9).

Pendidikan politik sangat penting karena keberadaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sikap dan kematangan politik masyarakatnya. Keadaan darurat pendidikan politik di Indonesia saat ini tidak bisa ditawar- tawar lagi belum lagi banyak korban jatuh karena mengadopsi budaya politik yang tidak sehat dan keadaan pendidikan politik saat ini masih belum optimal dalam kondisi masyarakat yang seandainya di mana politik pemahaman selalu ditafsirkan oleh orang awam dalam arti negatif mereka menganggap politik itu kotor penuh polusi, konflik, tipu daya, brutal, tidak manusiawi, dll. Bahkan ada orang yang tidak mengerti politik. Orang sering berbicara tentang politik tetapi tidak menyadari arti politik yang sebenarnya bahkan terkadang orang takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan fenomena tersebut dalam kehidupan masyarakat pendidikan politik menjadi sangat penting dan urgen bagi masyarakat. (Febriani, 2019: 82).

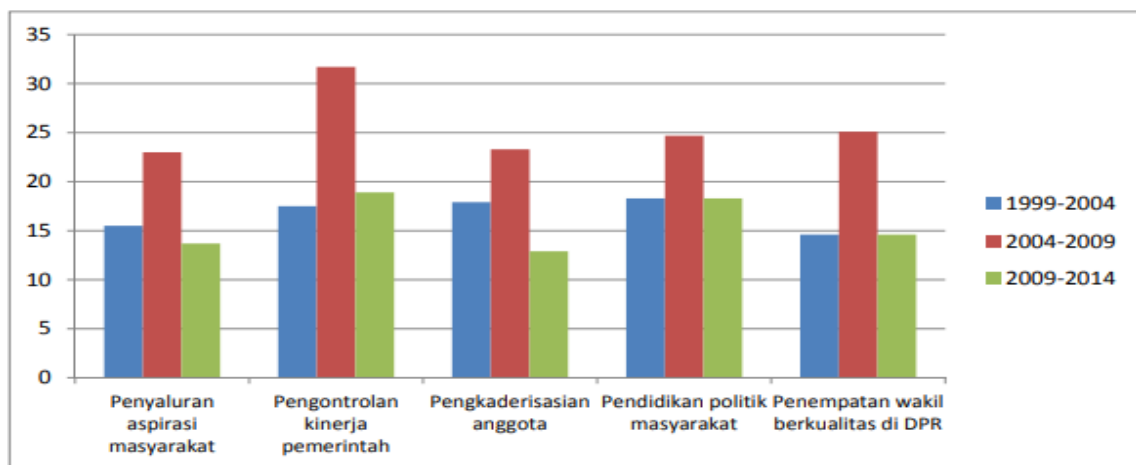
Aktor adalah pelaku pendidikan politik. Aktor dalam pendidikan politik meliputi; parpol, keluarga, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan (Nur Khoiron, 1999: 38). Menurut Permendagri No 36 Tahun 2010, pelaku pendidikan politik adalah: a. partai

politik; b. parpol lokal; c. lembaga kemasyarakatan; d. organisasi nirlaba lainnya; dan e. organisasi atau instansi vertikal di daerah. berdasarkan pernyataan ahli dan peraturan mendagri diatas dapat dilihat actor pendidikan politik yang paling berperan adalah partai politik. Partai politik memiliki hubungan dengan pendidikan politik karena partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik akan berhasil jika sebagian besar warga di lingkungan tersebut mampu berkontribusi dalam politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi nyata masyarakat dalam politik terlihat pada pemilihan parlemen langsung, saat dalam pemilu. Semakin tinggi angka partisipasi dan semakin rendah angka golongan putih dalam pemilu tersebut memperlihatkan bahwa parpol sukses melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan politik masyarakat (Kusuma dkk, 2020: 166).

Pendidikan politik bagi masyarakat dapat berlangsung sebagai bagian dari berbagai kegiatan, baik formal maupun nonformal. Setiap partai politik memiliki kebijakannya masing-masing mengenai bentuk kegiatan pendidikan politik contoh bentuk kegiatan seperti mengadakan seminar, workshop, kursus pelatihan, jambore, sekolah atau kegiatan positif lainnya (Kusuma dkk, 2020: 167). Pendidikan politik juga bisa menyasar kader partai dan caleg. Pendidikan yang diberikan parpol merupakan modal awal mereka agar bisa langsung disampaikan ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjelaskan pentingnya politik saat ini (Daud, 2019: 3).

**Gambar 1**

**Proporsi Kepuasan Publik terhadap Kinerja Partai Politik**



Sumber: Diolah dari Litbang KOMPAS dalam Nainggolan (2016: 22)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Partai Politik di bidang Pendidikan politik masyarakat sempat mengalami peningkatan dari tahun 1999 – 2004 ke tahun 2004 – 2009 kemudian mengalami kemerosotan dari tahun 2004 – 2009 ke tahun 2009 – 2014. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat kecewa dengan kinerja Partai Politik dalam Pendidikan Politik. Salah satu indikatornya adalah pendidikan politik belum dilakukan dengan optimal oleh Partai Politik ditambah pendidikan politik hanya dilakukan pada masa pemilu saja. Seperti yang dilansir dari rri.co.id menurut pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Hermansyah berpendapat Selama ini, setelah pemilu, partai politik lepas tangan dan tidak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (rri.co.id, 2019).

Partai politik tidak optimal dalam pendidikan politik karena beberapa hal: pertama, partai politik kekurangan dana untuk melakukan pendidikan politik dikarenakan uang yang dikeluarkan juga dipakai sebagai dana operasional sekretariat dan perawatan kantor sehingga uang yang diterima tidak akan mencukupi jika digunakan semata-mata untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Kedua, masih banyak anggota partai dan kader yang menganggap masa reses adalah pendidikan politik padahal masa reses adalah kewajiban bagi anggota legislatif untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya. Ketiga, sikap ketidakpedulian dan skeptis dari masyarakat yang menganggap semua parpol sama saja, yaitu datang kepada masyarakat hanya untuk mengumpulkan masyarakat untuk menggalang dukungan ketika Pemilu dilakukan. Hal ini terjadi, karena kader dan anggota partai tidak memiliki komitmen nyata terhadap pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat (Fadillah, 2017: 11).

Penulis memilih Partai NasDem dalam penelitian ini adalah karena partai NasDem tergolong partai yang baru didirikan pada tahun 2011 dan mampu meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 memperoleh 8.402.812 atau 6,72 persen suara. Saat Pemilu 2019, Suaranya meningkat menjadi 12.661.792 atau 9,05 persen suara. Hasil suara ini mampu meningkatkan posisi NasDem yang awalnya berada pada urutan 7 menjadi 5 besar (Nasional.kompas.com, 2019). Sementara itu khususnya di Pileg 2019 DPRD DKI Jakarta Partai NasDem memperoleh 309.790 suara di Jakarta dan memperoleh 7 kursi dari periode sebelumnya hanya kursi (mediaindonesia.com, 2019).

Kemudian, Partai NasDem adalah Partai pertama yang melakukan politik tanpa mahar. NasDem membebaskan semua biaya atau mahar politik bagi kepala daerah yang akan maju bersama NasDem (willyaditya.com, 2018). Slogan “Politik tanpa mahar” diciptakan bukan sebagai pencitraan, melainkan untuk menyerap keluhan masyarakat mengenai politik yang disamakan dengan uang. Partai NasDem akan terus berkomitmen membuat demokrasi tanpa mahar politik. Mahar politik diyakini menjadi salah satu penyebab munculnya praktik korupsi yang membuat publik tidak mempercayai parpol (Okezone.com, 2019).

Bukti politik tanpa mahar didalam konteks pendidikan politik NasDem yaitu Partai NasDem membekali para caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan kader Partai melalui pendidikan politik di sekolah legislative berupa materi pemahaman dasar mengenai politik tanpa mahar. Partai NasDem adalah partai yang tanpa mahar politik sehingga para calon legislatif dan kader partai diberikan pemahaman dasar mengenai politik tanpa mahar yang membedakan partai NasDem dengan partai lainnya. Caleg dan kader partai NasDem tidak diizinkan mengurus proyek, mencurangi atau mengakali APBN/APBD dan membekali soal moralitas (Merdeka.com, 2018). Salah satu contoh hasil pembekalan pendidikan politik tanpa mahar Partai NasDem yaitu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 Partai NasDem berhasil membuat kejutan. Partai NasDem berhasil menang di 11 provinsi dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada 2018. Dan di empat provinsi, NasDem mampu membawa kader internalnya menjadi Kepala Daerah (PartaiNasdem.id, 2018). Selain itu, penulis memilih Partai NasDem dalam konteks pendidikan politik adalah Partai NasDem memiliki lembaga pendidikan politik yang bernama Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem ciri khas yaitu memiliki kurikulum, kurikulumnya adalah aspek kepribadian, aspek kepartaian dan aspek kebangsaan.

Peneliti memilih DKI Jakarta karena DKI Jakarta adalah Ibukota negara Republik Indonesia sebagai pusat pemerintahan nasional sekaligus menjadi barometer politik nasional. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peeneliti belum banyak penelitian atau riset yang membahas pendidikan politik yang dilakukan oleh partai NasDem terutama di DKI Jakarta. Memang, yang membahas pendidikan politik partai NasDem sudah ada tetapi, itu baru dilakukan di pekanbaru pada tahun 2015/2016 karya dari Ichwan Nur Fadhillah. Peneliti memilih Partai NasDem DKI Jakarta untuk diteliti karena Partai

NasDem DKI Jakarta tidak terdapat kekurangan dana dalam kegiatan atau program pendidikan politik terlihat penggunaan dana dalam LPJ untuk melaksanakan program pendidikan politik, Partai NasDem DKI Jakarta bisa menggunakan dana puluhan juta sampai ratusan juta (LPJ Bantuan Keuangan DPW NasDem DKI Jakarta, 2020).

Selain itu, penulis memilih periode pasca pemilu serentak 2019 karena menurut penulis partai politik biasanya sangat gencar dalam memberikan pendidikan politik saat menjelang pemilu dan mulai berkurang intensitas dalam memberikan pendidikan politik setelah pemilu dilaksanakan sehingga penulis tertarik untuk meneliti pada periode pasca pemilu serentak 2019. Berdasarkan uraian diatas, peneliti terdorong untuk melihat peran dan proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem untuk masyarakat DKI Jakarta. Melalui penelitian berjudul: Peran Partai NasDem Dalam Pendidikan Politik Di Dki Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan dalam peneitian ini adalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi di lapangan secara lebih detail, jelas dan mendalam. Riset ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi / kejadian sehingga data yang dikumpulkan bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Teknik interview ang dipakai penulis yaitu terstruktur dengan menetapkan lebih dulu beberapa pertanyaan yang akan dikirimkan untuk responden. Agar percakapan saat interviu jadi fokus dan tajam pada tujuan yang dimaksudkan dan untuk mencegah terlalu banyak diskusi yang tidak perlu. Untuk Narasumber wawancara adalah Staf Pengajar Akademi Bela Negara Partai NasDem yaitu Khairil Azhar, Kepala Sekretariat DPW Partai NasDem DKI Jakarta yaitu Baruri Pasolima, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Daerah DPW Partai NasDem DKI Jakarta yaitu Anwar Sjani, Pengamat atau



Akademisi Politik yaitu Efriza. Studi Pustaka, digunakan untuk mendapatkan landasan dan pandangan secara tertulis, yang dilaksanakan melalui menganalisis berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan perkara yang dikaji. Data sekunder dengan teknik ini didapatkan saat menjelajah Internet seperti website resmi Partai NasDem dan membaca berbagai literatur, yaitu jurnal, buku, dan skripsi atau penelitian terdahulu.

Ada 3 model analisa data yang dipakai dalam penelitian kualitatif, ialah Analisis Perbandingan Tetap, Analisa Data Spradley, dan Analisa Data dari Miles dan Huberman. Analisa data kualitatif ada 3 tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (Prastowo, 2011: 35).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Peran Partai NasDem Dalam Pendidikan Politik Di DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019**

Peran partai NasDem dalam pendidikan politik pasca pemilu serentak 2019 yaitu seperti yang penulis jelaskan sebelumnya diatas bahwa Partai NasDem membuat dan menyelenggarakan program- program pendidikan politik baik itu eksternal maupun internal seperti kegiatan Sekolah Legislatif, E-Workshop, Magang dan lain- lain. Berikut peran partai Nasdem dalam Pendidikan politik di DKI Jakarta pasca Pemilu serentak 2019.

#### **1. Pendidikan Politik**

Menjalankan atau melakukan pendidikan politik baik itu untuk internal atau eksternal. Menurut AD/ART Partai NasDem. Pendidikan politik internal di Partai NasDem diperuntukkan untuk internal partai seperti kader, pengurus partai, anggota partai, dan calon legislative. Sementara itu pendidikan politik eksternal dari NasDem diperuntukkan kepada kelompok pemuda dan masyarakat. Pendidikan politik di Partai NasDem DKI Jakarta pada pasca pemilu serentak sempat mengalami tatap muka seperti seminar dan workshop tetapi setelah adanya pandemic kegiatan pendidikan politik lebih sering dilakukan via online seperti Google meet dan Zoom. Berikut penulis sajikan pendidikan politik Partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak di tahun 2019.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak di tahun 2019 terdiri dari tiga kegiatan pendidikan politik. Uniknya, kegiatan pendidikan politik tidak hanya seminar, workshop, dan pelatihan tetapi Partai NasDem



DKI Jakarta juga memasukkan kegiatan seperti rapat koordinasi wilayah dan pengajian serentak ke dalam kategori pendidikan politik. Ini memberikan sebuah contoh bahwa pendidikan politik bisa melalui kegiatan positif lainnya selain seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan. Selanjutnya penulis akan memaparkan table kegiatan atau program pendidikan politik partai NasDem DKI Jakarta di tahun 2020.

Tahun anggaran 2020 terdapat 9 program pendidikan politik. Ini merupakan sebuah perkembangan program pendidikan politik yang baik karena menurut Pak Baruri selaku Kepala Sekretariat DPW Partai NasDem DKI Jakarta biasanya mereka melakukan pendidikan politik 5-6 setiap tahunnya. Untuk selanjutnya penulis akan menjelaskan salah satu program pendidikan politik di Partai NasDem DKI yang terdapat dalam table diatas. Program ini merupakan program unggulan dari Partai NasDem DKI Jakarta pada tahun 2020 dan cukup masif dipublikasikan di media massa seperti MediaIndonesia.com, Metro Tv dan media social lainnya milik Partai NasDem. Program pendidikan politik ini bernama E-Workshop 1000 kader Partai NasDem Se DKI Jakarta.

E-Workshop Pendidikan Politik Kader NasDem Se-DKI Jakarta. Kegiatan ini dilakukan pada Kamis s/d Sabtu, 16 s/d 18 Juli 2020 pukul 08.45 s/d 12.15.WIB. E-Workshop Pendidikan Politik Kader NasDem Se-DKI ini merupakan program pemberian pendidikan politik secara online yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman digital marketing secara politis. Program ini diikuti oleh 1000 partisipan kader penggerak partai NasDem DKI Jakarta (Laporan Kegiatan E-Wokrshop 1000 kader Partai NasDem Se DKI Jakarta, DPW Partai NasDem DKI Jakarta).

## **2 Sekolah Legislatif**

Program ini termasuk pendidikan politik terstruktur atau tersistematis karena memiliki kurikulum. Program ini merupakan pemberian pendidikan politik kepada para kader partai NasDem, khususnya yang berada di DKI Jakarta. Pendidikan politik yang diberikan menjelaskan mengenai pembahasan etika politik sebagai legislator (kedewanan), kepartaian, dan pemabngunan karakter. Ditambah lagi, diberikannya juga pendidikan dalam memahami pembahasan anggaran dan perundang-undangan. Sekolah legislative NasDem dilaksanakan di kampus ABN (Akademi Bela Negara) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan. Peserta diisi oleh kader NasDem DPRD kabupaten/kota dari beberapa wilayah DKI Jakarta.

Materi yang ada dalam pendidikan politik di ABN Partai NasDem adalah kepribadian, kebangsaan dan keterampilan dalam berpolitik. Ketiga aspek ini sangat sesuai dengan

struktur kurikulum ABN NasDem. Struktur kurikulum adalah bagunan ideal rencana induk penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) dalam sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan seperti ABN NasDem. Selain itu struktur kurikulum juga menggambarkan tujuan besar rencana program yang menitikberatkan pengembangan kapasitas kader partai pada aspek kepribadian, kepartaian dan kebangsaan. Aspek kepribadian merupakan fondasi awal untuk membentuk dan memperkaya aspek afeksi kader secara psikologis dan individual, dimana titik tekan aspek kepribadian ini adalah menumbuhkan dan memperkuat kemampuan dan keterampilan kader dalam mengelola keterampilan emosional secara cerdas dan bertanggung jawab (Dokumen Kurikulum Akademi Bela Negara Partai NasDem, 2017: XIII).

Aspek kepartaian merupakan jembatan yang akan membawa kemampuan dan keterampilan kader yang cerdas secara emosi dan spiritual, untuk dan dalam rangka mengenali dan memperteguh keyakinan kader terhadap eksistensi Partai NasDem. Aspek Kepartaian akan membekali kemampuan kognisi kader yang jernih dan seimbang dalam melihat kehidupan politik dan demokrasi secara bertanggungjawab dan berkesinambungan. Sedangkan aspek kebangsaan akan membekali aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara terukut dan terstruktur, dalam rangka memperteguh keyakinan kader untuk memperjuangkan cita cita restorasi Partai NasDem yang akan terus mengawal eksistensi NKRI melalui gerakan perubahan yang cerdas dan diterima masyarakat secara luas (Dokumen Kurikulum Akademi Bela Negara Partai NasDem, 2017: XIII).

### **3. Pendidikan Politik untuk Masyarakat**

Program ini merupakan program pemberian pendidikan politik melalui kerja praktik bagi para mahasiswa atau fresh graduate di Partai NasDem DKI Jakarta untuk memahami pendidikan politik secara praktis. Tempat pelaksanaannya di kantor Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta. Waktu pelaksanaannya 3 bulan (tenggat waktu tertentu) kegiatan ini baru dimulai dari tanggal 4 Oktober 2021. Pesertanya nuntuk saat ini 11 orang. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk dapat mempraktikkan pendidikan politik secara praktis di ruang lingkup Fraksi NasDem DKI Jakarta. Posisi magangnya yaitu ada humas, advokasi public, research & development, content creator, desain grafis dan divisi kebijakan public dan isu strategis (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

Kegiatan MABAR ini merupakan kegiatan pendidikan politik eksternal dari Partai NasDem DKI Jakarta. Karena, kegiatan ini diikuti oleh pemuda yaitu mahasiswa.

Kegiatan ini tidak diikuti oleh kader dan anggota partai NasDem. Untuk mengikuti kegiatan ini tidak mudah karena, harus mengikuti mekanisme penerimaan yang cukup sulit dan ada beberapa tahapan yaitu pendaftaran, screening, assessment, konfirmasi undangan peserta, wawancara, bimtek dan bagi yang mau mengikuti kegiatan tersebut harus membuat motivasi magang di NasDem DKI Jakarta. Program ini merupakan sebuah organisasi yang diperuntukan bagi setiap mahasiswa di beberapa kampus tertentu di lima wilayah DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan edukasi politik secara praktis. Dalam hal ini, Liga mahasiswa NasDem dibentuk oleh Partai NasDem sebagai gerakan pemuda untuk membangun partai NasDem yang lebih progresif dengan melibatkan para pemuda. Waktu pelaksanaannya per periode/per satu tahun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk dapat mempraktikkan pendidikan politik secara praktis dalam pengabdian masyarakat (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

Kegiatan Kursus politik ini merupakan bagian kegiatan yang ada di Liga Mahasiswa NasDem. Kursus politik ini bertujuan mengenai pentingnya pemuda saat ini untuk meleak politik. Karena, politik itu bukanlah suatu yang buruk dalam kegiatan sehari-hari tanpa disadari itu adalah aktivitas politik. Selain itu, politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Materi dalam kursus politik ini juga sudah dikemas secara kekinian agar mahasiswa dapat tertarik dengan politik dan mudah dicerna oleh mereka. Kegiatan ini penting karena Partai NasDem DKI Jakarta mau pemuda atau mahasiswa ikut berpartisipasi terhadap politik pemerintah.

Metode yang digunakan disini seperti apa yang disampaikan sebelumnya yaitu dengan menggunakan materi kekinian yang mudah diserap oleh anak muda. Anak muda saat ini tidak bisa lepas dari media social sehingga pendekatan yang Partai NasDem DKI Jakarta gunakan melalui media social seperti melalui Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Jika mereka tertarik untuk belajar politik lebih lanjut mereka para pemuda atau masyarakat bisa mengisi biodata kemudian diundang ke kampus yang dimiliki partai NasDem yaitu Akademi Bela Negara Partai NasDem disana mereka akan mengikuti kegiatan pendidikan politik yang tahap yang lebih lanjut. Yang terpenting adalah Partai NasDem DKI Jakarta sudah menawarkan program pendidikan politik agar masyarakat bisa mengikuti kegiatan tersebut dan menjadi meleak politik.

#### **4 Pembekalan Politik Tanpa Mahar Dalam Pendidikan Politik Di Partai NasDem DKI Jakarta**

Salah satu ciri khas yang berbeda dari Partai NasDem dengan partai lainnya adalah Partai NasDem memiliki jargon Politik Tanpa Mahar. Politik Tanpa Mahar artinya adalah seseorang yang dicalonkan sebagai kepala daerah atau anggota legislatif tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kepada partai dalam proses pencalonannya (Sahroni & Dkk, 2019: 147). Jargon politik tanpa mahar ini pertama kali memang dicetuskan oleh Partai NasDem. Konsep politik tanpa mahar ini adalah suatu konsep yang muncul dan dicetuskan oleh Partai NasDem yang berawal dari kegelisahan Partai NasDem melihat situasi kepartaian di Indonesia yang terdapat suatu “ruang kosong” yaitu tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap partai politik yang rendah, sehingga konsep tersebut lahir guna menjawab dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

NasDem mencoba membangun sebuah tradisi baru yang menghasilkan sebuah ciri khas yaitu jargon politik tanpa mahar. Seperti yang kita tahu dalam pesta politik seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada setiap calon nya tentu membutuhkan mahar yang besar untuk maju dalam kontestasi politik tersebut. Kemudian setelah mereka terpilih mereka juga berpikir untuk balik modal karena kehilangan cukup banyak uang dalam kontestasi politik tersebut tidak heran banyak Gubernur, Bupati, Walikota dan Anggota Legislatif yang tertangkap Kasus korupsi. Maka dari itu, jargon politik tanpa mahar partai NasDem ini hadir bertujuan untuk meminimalisir kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggota partainya. Jargon Politik tanpa mahar ini dicetuskan oleh tokoh Partai NasDem yaitu Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem.

#### **5. Faktor-Faktor Penghambat Pendidikan Politik Partai NasDem DKI Jakarta**

Pertama hambatan dalam program Sekolah Legislatif NasDem DKI Jakarta, hambatannya adalah masih terdapat beberapa peserta yang tidak mengikuti kegiatan dari keseluruhan peserta yang didaftarkan. Hal tersebut disebabkan kemungkinan adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh kader (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

Kendala lainnya dalam sekolah legislative yang diadakan di ABN Partai NasDem yang pertama adalah jarak, karena partai NasDem memiliki kader di berbagai macam daerah yaitu terdapat di 34 provinsi di Indonesia, yang kedua kendalanya adalah biaya dimana semakin banyak program dan kegiatan maka akan semakin banyak biaya yang

dibutuhkan. Tetapi, sampai saat ini semua masih bisa dibiayai dan difasilitasi oleh Partai NasDem. Kendala yang ketiga adalah ketidaksetaraan latar belakang pendidikan karena masih banyak kader dan masyarakat yang petani, pendidikan hanya sampai SD, ada yang masih mengalami sekolah zaman dahulu Sekolah Rakyat (SR) dan ada yang sudah berpengalaman di dalam dunia politik bertahun-tahun. Tetapi, ABN Partai NasDem menganggap itu semua bukan sebagai sebuah kendala, mereka menganggap itu adalah sebuah tantangan yang harus mereka dihadapi.

Kemudian, kendala atau faktor penghambat dalam kegiatan E-Workshop 1000 kader Partai NasDem Se DKI Jakarta adalah dikarenakan terjadi pandemic Covid-19 dapat menyebabkan terjadinya pembatasan komunikasi yang dilakukan, sehingga aspek pengawasan dari berjalannya program pendidikan politik ini kurang maksimal. Kemudian, kemungkinan terjadinya masalah konektivitas jaringan internet dari beberapa peserta yang mengikuti kegiatan. Selanjutnya, faktor penghambat dalam kegiatan Magang Politik NasDem adalah dikarenakan terjadi pandemic Covid-19 dapat menyebabkan terjadinya pembatasan komunikasi yang dilakukan, sehingga koordinasi dan penugasan pelaksanaan magang kurang cukup maksimal (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

Lalu, faktor penghambat dalam kegiatan Liga Mahasiswa NasDem. Hambatannya adalah terkait kurangnya publikasi dari program ini. Sehingga, masih belum banyak masyarakat yang mengetahui dengan program ini. Ditambah lagi, di kondisi pandemic mengharuskan dilakukannya pembatasan kegiatan dan berdampak terhadap perencanaan dan output kegiatan yang dilaksanakan (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

Faktor penghambat utama adalah sikap apatisisme masyarakat terhadap politik. Faktor penghambat ini sama dengan faktor penghambat pendidikan politik secara umum yang terdapat dalam buku Pendidikan Politik karya dari Kartini Kartono. Dalam hal ini masih banyak masyarakat atau pemuda yang menganggap politik itu kotor dan mengerikan padahal segala sesuatu termasuk aktivitas sehari-hari itu diatur dalam politik. Dan ini menjadi tugas dari partai politik terutama partai NasDem untuk melakukan pendekatan, memberikan motivasi dan stimulus agar masyarakat bisa memiliki kesadaran berpolitik yang baik.

## 6. Faktor-Faktor Pendorong Pendidikan Politik Partai NasDem DKI Jakarta

Faktor pendorong pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik seperti Partai NasDem adalah instruksi dari pemerintah melalui peraturan perundangundangan. Fungsi Parpol sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila (Masriyani, 2019: 99-100).

Dari hasil wawancara faktor pendorong ABN Partai NasDem dalam pendidikan politik adalah supaya Partai NasDem dan kader nya dapat populer bagi masyarakat di daerah pemilihannya, kemudian supaya Partai NasDem dan kadernya dapat disukai masyarakat dan yang terakhir agar Partai NasDem dan kadernya dapat menang dalam pemilihan dan dipilih lagi dan lagi dalam pemilihan. Dalam internal NasDem DKI Jakarta tidak terdapat senioritas seperti orang lama dan orang baru dalam partai. Dan mengenai faktor pendorong nya dalam wawancara tersebut adalah siapapun yang ingin masuk dalam partai NasDem DKI Jakarta untuk menjadi kader, kader tersebut diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan politik agar kader bisa memahami politik tanpa mahar dan gerakan perubahan restorasi. Selain itu Partai NasDem DKI Jakarta juga memberikan buku putih panduan untuk kader tetapi, yang menjadi kendala adalah minat untuk membaca masih rendah. Maka dari itu, Partai NasDem DKI Jakarta juga melakukan pengkaderan di tingkat daerah (DPD), DPC sampai tingkat DPRW/DPRT.

Faktor utama yang menjadi pendorong Partai NasDem DKI Jakarta untuk senantiasa melakukan pendidikan politik adalah komitmen yang dimiliki Partai NasDem DKI Jakarta untuk senantiasa menjalankan visi dan misinya, yaitu “Gerakan Perubahan

Restorasi Indonesia”. Dalam hal ini, dengan visi misi yang dimiliki Partai NasDem DKI Jakarta, dapat diharapkan mampu memberikan berbagai edukasi melalui program-program yang dicanangkan, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang demokratis (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021). Pendidikan politik di Partai NasDem sifatnya adalah instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Kader-kader partai NasDem yang mau berpartisipasi secara langsung harus mengetahui mengenai Partai NasDem, politik Tanpa Mahara, dan Gerakan Perubahan Restorasi dengan cara mengikuti kegiatan pendidikan politik yang ada di Partai NasDem DKI Jakarta. Dengan konsep kebaruan Partai NasDem dari arahan DPP bisa membuat kader dan masyarakat senang dan menganggap pendidikan politik itu penting.

Melalui berbagai program yang dikembangkan oleh partai NasDem DKI Jakarta, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait Magang Politik NasDem dan Liga Mahasiswa NasDem, Partai NasDem membuka ruang sebesar-besarnya dan memfasilitasi terhadap masyarakat dalam memberikan pembekalan pengetahuan politik. Dalam hal ini, Partai NasDem tidak memberikan batasan atau kualifikasi tertentu terhadap masyarakat. Sehingga, program pendidikan politik NasDem ini mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat di DKI Jakarta (Riset Tim Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, 2021).

## **KESIMPULAN**

Pendidikan politik merupakan sebuah hal yang urgent terutama bagi masyarakat demokrasi modern saat ini. Pendidikan politik ini menjadi suatu hal yang penting karena dapat membuat masyarakat melek politik dan sadar akan hak dan kewajibannya menjadi masyarakat yang baik dalam berpolitik. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan politik khususnya masyarakat DKI Jakarta karena, DKI Jakarta adalah barometer Indonesia dalam pergerakan politik yang dinamis. Salah satu aktor pendidikan politik dalam pergerakan politik yaitu Partai Politik. Partai Politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik untuk kader dan masyarakat. Bentuk dari pendidikan politik di partai politik bermacam-macam ada seminar, workshop, diskusi, kursus pelatihan, sekolah, dan lain-lain.



Salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia saat ini adalah Partai NasDem. Dalam pendidikan politik Partai NasDem memiliki banyak program contohnya yaitu E-Workshop 1000 kader Partai NasDem se DKI Jakarta, Sekolah Legislatif, Magang Pintar Bareng Fraksi NasDem DKI Jakarta (MABAR), Liga Mahasiswa NasDem DKI Jakarta dan masih banyak lagi seperti yang penulis jabarkan dalam table diatas. Program- program pendidikan politik Partai NasDem DKI Jakarta ini ada yang diperuntukkan untuk masyarakat dan kader partainya. Menurut, penulis secara keseluruhan program pendidikan politik Partai NasDem DKI Jakarta ini di dominasi oleh program pendidikan politik untuk kadernya, memang ini hal yang sah-sah saja karena ingin menghasilkan kader yang baik untuk merawat basis konstituennya, tetapi agar lebih baik Program pendidikan politik untuk masyarakat juga diperbanyak agar seimbang.

Secara keseluruhan Partai NasDem khususnya Partai NasDem DKI Jakarta sudah cukup baik dalam memberikan pendidikan politik. Partai NasDem DKI Jakarta telah melaksanakan program pendidikan politik yang terstruktur dan tersistematis seperti di ABN Partai NasDem yang sesuai dengan Konsep Pendidikan Politik dari Kartini Kartono, tidak hanya pendidikan politik terstruktur Partai NasDem DKI Jakarta juga sudah melaksanakan program pendidikan politik isidental seperti kegiatan E-Workshop saat masa PSBB.

Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat bagi kader atau anggotanya dilihat dari program-program pendidikan politiknya dan sesuai dengan konsep dari Carl J.Friedrich yang menyatakan bahwa partai politik atau pimpinannya harus memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang sifatnya idiil serta materiil. Tetapi kekurangannya dari Partai NasDem DKI Jakarta adalah belum banyak program pendidikan politik untuk masyarakat DKI Jakarta secara langsung sehingga perannya dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat DKI Jakarta masih belum terlalu terlihat secara signifikan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Affandi, I. (2012). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press.
- Affandi, I. (2021). *Pendidikan Politik Kepemimpinan Dan Kepeloporan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza & Indrawan, J. (2019). *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, A. F. (2011). *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta: Kemitraan.
- Handoyo, E & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Heufers, R, et al. (2011). *Konstituen Pilar Utama Partai Politik Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen*. Yogyakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexy, J. M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naning, R. (1982). *Pendidikan Politik dan Regenerasi*. Yogyakarta: Liberty.
- National Democratic Institute For International Affairs (NDI). (2008). *Hubungan Dengan Konstituen Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik*. Washington DC: United States Agency For International Development (USAID).
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur, K. M. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual Dan Kerangka Kerja)*. Yogyakarta: LKIS.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.

- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir. (2014). *Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung.

### **Jurnal:**

- Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 1(2), 77-89.
- Fadillah, I. N. (2017). Pendidikan Politik Oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*. 4 (1), 1-13.
- Febriani, I. (2019). Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. Edisi 08, 73-92.
- Fidelia. (2019). Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. Edisi 08, 53-72.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*. 10(1), 1-19.
- Kusuma, I. G. W., et al. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 1 (1), 164 – 169.
- Lestari, D. (2019). Pilkada Dki Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia. *Jurnal SIMULACRA*, 2(1), 31-37.
- Masriyani & Yanti, H. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. *Jurnal Wajah Hukum*. 3(1), 97-109.\
- Nurdiansyah, E. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 2(1), 54 – 58.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. 5(1), 51-59.
- Permata, C. Q. N & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*. 4(1), 93-105.

- Sahroni, A. et al. (2019). "Politik Tanpa Mahar": Semiotika Jargon Komunikasi Partai Nasional Demokrat Di Era Demokrasi Biaya Tinggi. *Jurnal Semiotika*, 13(2), 146-152.
- Santoso. (2017). Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula. PGSD FKIP UMK, 1-10.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1).
- Sitepu, E. (2016). Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*. 2(1), 1-8.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. 5(1), 43-53.
- Supriyanto, D. (2012). Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review Terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*. 3(8), 149- 191.
- Yoesmar, F. (2019) Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. Edisi 08. 39-52.

### **Laporan:**

- Aman. (2007). "Metodologi Penelitian Kualitatif". disampaikan dalam acara Diklat Penulisan Skripsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi yang diselenggarakan oleh HIMA Pendidikan Sejarah FISE UNY .

**Peraturan/Undang-Undang:** AD/ART Partai NasDem 2017 Permendagri No. 36 Tahun 2010.

### **Publikasi Resmi Lembaga Pemerintah:**

- BPK RI. (2018). Pemerintah Terbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan DanaParpol. Retrieved from Detik.com & Kontan.co.id: <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Pemerintah-Terbitkan-PP-Kenaikan-Dana-Parpol.pdf> diakses pada 10 September 2021.

- Kemendagri. (2021). Tingkat Literasi Indonesia di Dunia Rendah, Ranking 62 Dari 70 Negara. Retrieved from Perpustakaan Kemendagri: <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661> diakses pada 8 September 2021.

KPU Kota TanjungPinang. (2020). Dampak Politik Uang Terhadap Masyarakat: <https://kpu-tanjungpinangkota.com/2020/08/dampak-politik-uang-terhadap-masyarakat/> diakses pada 13 Januari 2022.

### **Skripsi:**

Daud, M. D. (2019). *Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.

### **Website Berita:**

Abn-NasDem.com. (2019). About ABN- Akademi Bela Negara NasDem: [https://abn-nasdem.com/Create\\_document\\_about/v\\_all\\_one\\_about](https://abn-nasdem.com/Create_document_about/v_all_one_about)

Aditya, W. Willyaditya.com. (2018). Kunci Sukses NasDem , Politik Tanpa Mahar: <https://willyaditya.com/kunci-sukses-nasdem-politik-tanpa-mahar/>

Annur, C, M. (2021). Katadata. DKI Jakarta Kembali Jadi Provinsi Paling Demokratis di Indonesia pada 2020. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/06/dki-jakarta-kembali-jadi-provinsi-paling-demokratis-di-indonesia-pada-2020>

Batubara, P. (2019). Okezone.com. Pilkada 2020, NasDem: “Politik Tanpa Mahar Bukan Pencitraan Tapi Tuntutan Rakyat”: <https://nasional.okezone.com/read/2019/12/08/337/2139435/pilkada-2020-nasdem-politik-tanpa-mahar-bukan-pencitraan-tapi-tuntutan-rakyat>

Carina, J. (2019). Kompas.com. “Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019: Dari yang Melejit, Tersingkir, hingga yang Bertahan Jadi Juara”: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all>.

DPW Partai NasDem DKI Jakarta. (2018).

PartaiNasDem.id. Politik Tanpa Mahar Komitmen Pak Surya untuk Bangsa: <http://nasdemjakarta.id/2018/06/28/politik-tanpa-mahar-komitmen-pak-surya-untuk-bangsa/>

Majni, A, F. (2019). Mediaindonesia.com. “NasDem Peroleh 7 Kursi DPRD DKI 2019-2024”: <https://mediaindonesia.com/megapolitan/252721/nasdem-peroleh-7-kursi-dprd-dki-2019-2024>

Prasetya, E. (2018). Merdeka.com. NasDem bekali Caleg pemahaman partai tanpa mahar dan beri bantuan logistic: <https://www.merdeka.com/politik/nas-dem-bekali-caleg-pemahaman-partai-tanpa-mahar-dan-beri-bantuan-logistik.html>

Putra, R. A. (2019). DW.com. Pengamat: Pasca Pemilu, Pendidikan Demokrasi Penting Untuk Membangun Persatuan: <https://www.dw.com/id/pengamat-pasca-pemilu->

[pendidikan-demokrasi- penting-untuk-membangun- persatuan/a-48812040](#)  
diakses pada 7 Desember 2021.

Santosa, K. (2019). Rri.co.id. Pengamat Sebut Pendidikan Politik di Pemilu 2019 Belum Optimal: <https://rri.co.id/1455-pemilu-2019/658289/pengamat-sebut-pendidikan-politik-di-pemilu-2019- belum-optimal pengumuman-hasil-pemilu?page=all> diakses pada 7 Desember 2021.

**Skrip Yang Tidak Diterbitkan:**

DPRD, Tim Fraksi NasDem. (2021). Hasil Jawaban Penelitian Pendidikan Politik Partai NasDem DKI Jakarta. Unpublished Manuscript, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Indonesia.

NasDem, ABN. (2017). Dokumen Kurikulum Akademi Bela Negara Partai NasDem 2018. Unpublished Manuscript, Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jakarta, Indonesia.

NasDem, DPW Partai. (2020). Laporan Kegiatan E-Workshop 1000 Kader Partai NasDem se DKI Jakarta.